



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 468/SK/2BAN-PT/Akret/S/XII/2014*

**Akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi Dan  
Dokumentasi (PPID) Kota Bandung Dalam Permohonan  
Informasi Publik (Studi Kasus Pada Sengketa Informasi  
Pemberian Informasi Dokumen Izin Mendirikan  
Bangunan)**

Oleh

Robby Abdul Malik

2013310047

Bandung

2018



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi Dan  
Dokumentasi (PPID) Kota Bandung Dalam Permohonan  
Informasi Publik (Studi Kasus Pada Sengketa Informasi  
Pemberian Informasi Dokumen Izin Mendirikan  
Bangunan)**

Skripsi

Oleh

Robby Abdul Malik

2013310047

Pembimbing

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si.

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**Tanda Pengesahan Skripsi**


Nama : Robby Abdul Malik  
Nomor Pokok : 2013310047  
Judul : Akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung Dalam Pemberian Informasi Publik (Studi Kasus Pada Sengketa Informasi Pemberian Informasi Dokumen Izin Mendirikan Bangunan)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Senin, 15 Januari 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

: 


**Sekretaris**

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si

: 

**Anggota**

Maria Rosarie Harni Triastuti S.IP., M.Si

: 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## PERNYATAAN



Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Robby Abdul Malik  
NPM : 2013310047  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung Dalam Pemberian Informasi Publik (Studi Kasus Pada Sengketa Informasi Permohonan Informasi Dokumen Izin Mendirikan Bangunan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Januari 2018

  
  
Robby Abdul Malik

## **ABSTRAK**

Nama : Robby Abdul Malik  
NPM : 2013310047  
Judul : *Akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung Dalam Permohonan Informasi Publik (Studi Kasus Pada Sengketa Informasi Permohonan Informasi Dokumen Izin Mendirikan Bangunan)*

---

Judul penelitian ini adalah “Akuntabilitas PPID Kota Bandung Dalam Pemberian Informasi Publik (Studi Kasus Pada Sengketa Informasi Pemberian Informasi Dokumen Izin Mendirikan Bangunan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Akuntabilitas organisasi publik yaitu PPID Kota Bandung sebagai organisasi publik dalam memberikan informasi publik khususnya informasi mengenai dokumen izin mendirikan bangunan. Penelitian ini menggunakan teori Koppell mengenai dimensi akuntabilitas organisasi publik dimana ruang lingkup penelitian ini adalah Akuntabilitas PPID Kota Bandung yang ditinjau dari dimensi transparansi, kewajiban, pengontrolan, tanggung jawab, dan responsibilitas.

Berdasarkan tujuannya penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, observasi, dan wawancara terhadap informan, seperti Pegawai PPID Kota Bandung, Pemohon Informasi IMB yang melakukan sengketa informasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik penelitian kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kelima dimensi yang dikemukakan oleh Koppell belum diterapkan secara sepenuhnya oleh PPID Kota Bandung dalam memenuhi akuntabilitas pemberian informasi publik terkait sengketa informasi pemberian informasi IMB. Hal tersebut dibuktikan dengan kelima dimensi yaitu transparansi, kewajiban, pengontrolan, tanggung jawab dan responsibilitas yang belum terpenuhi. Itu terbukti dengan informasi fungsi dan kinerja terkait IMB yang tidak diumumkan secara spesifik, pemberian informasi IMB tidak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu masih adanya saling lempar antar lembaga bagi pemohon informasi untuk mendapatkan informasi IMB, juga tidak adanya penerapan sanksi yang tegas bagi pegawai PPID yang tidak memberikan informasi kepada pemohon informasi.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah seharusnya PPID Kota Bandung bisa memberikan informasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, selain itu PPID Kota Bandung harus melakukan control yang lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya, selain itu PPID Kota Bandung harus menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi pegawainya yang tidak memberikan informasi kepada pemohon informasi

Kata Kunci : Akuntabilitas, Akuntabilitas Organisasi Publik

## ABSTRACT

Name : Robby Abdul Malik  
NPM : 2013310047  
Title : *Accountability of Information and Documentation Management Officer (PPID) of Bandung City for Public Information (A Case Study Disputes Document Information Providing Information Building Permit)*

---

*The title of this research is "Accountability PPID Bandung In Providing Public Information (A Case Study Disputes Document Information Providing Information Building Permit). The purpose of this study is to describe how the accountability of public organizations namely PPID Bandung as public organizations in providing public information, especially information about building permit documents. This research uses Koppell's theory about the dimension of accountability of public organization in which the scope of this research is Accountability PPID Bandung City which viewed from the dimension of transparency, obligation, controlling, responsibility, and responsibilitas.*

*Based on the objective of this research is descriptive using data collection techniques such as document study, observation, and interviews with informants, such as Employee PPID Bandung, IMB Information Applicant who dispute the information. The data obtained were analyzed using qualitative research techniques*

*based on the results of research that has been done, the five dimensions of Koppell put forward not been applied perfectly by PPID Bandung. This is evidenced by the five dimensions of transparency, liability, controlability, responsibility and responsiveness that have not been fulfilled. This is evidenced by the information about the function and performance related to the IMB that is not specifically announced, the IMB information is not timely in accordance with the stipulated provisions. In addition, there are inter-institutional interlocutors for information requests to obtain IMB information, as well as the absence of strict sanctions implications for PPID employees who do not provide information to applicants for information.*

*Recommendation that can be given is supposed PPID Bandung can provide information in accordance with provisions that have been determined, in addition to PPID Bandung should perform better control in carrying out its main duties and functions, in addition PPID Bandung must apply a more assertive sanctions for employees who do not provide information to the information applicant*

*Keywords: Accountability, Public Organization Accountability*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah dan berkat-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung Dalam Pemberian Informasi Publik (Studi Kasus Pada Sengketa Informasi Permohonan Informasi Dokumen Izin Mendirikan Bangunan)**. Skripsi ini merupakan prasyarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan penulis di kemudian hari.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan kedua saudara penulis yang selalu mendukung apapun keputusan yang saya lakukan dan selalu menyayangi penulis dengan cara mereka sendiri.
2. Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
3. Tutik Rachmawati, S.IP., MA.,Ph.D dan Tresno Sakti Herwanto selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi

Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

4. Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si selaku Dosen pembimbing saya, yang telah sabar banyak membimbing saya setiap hari dalam mengerjakan penelitian ini.
5. Ibu Susana Ani selaku dosen wali, yang telah memberikan saya berbagai masukan dalam memilih mata kuliah yang ingin dipilih saat perwalian.
6. Bapak Andoko P. Sadewo yang sudah banyak membantu dan menghibur penulis selama melaksanakan perkuliahan di Fisip Unpar
7. Bapak Deny, Ibu Indraswari, Ibu Gina, Bapak Pius Suratman Kartasasmita, Bapak Ulber, Ibu Maria dan segenap Dosen Pengajar serta pegawai Tata Usaha yang telah memberikan pembelajaran, baik materil maupun ilmu moral kepada penulis selama berada di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
8. Bapak Mendi Murshal yang sudah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Devinisa Suhartono yang sudah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.



10. Bapak Budi Yoga dan Bapak Dan Satriana selaku Komisioner dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang sudah banyak membantu memberikan informasi untuk penelitian ini.
11. Bapak Yusuf, Bapak Faisal, Bapak Ali selaku pegawai PPID Kota Bandung terimakasih sudah memperbolehkan saya melakukan penelitian di PPID
12. Bapak John, Mas Vincen yang telah banyak memberikan informasinya untuk membantu kelancaran penelitian ini.
13. Natasya Abilla yang selalu menemani penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini.
14. Eka Candra yang sudah menjadi teman terbaik penulis selama melaksanakan perkuliahan di Fisip Unpar.
15. Ika Ferina Br Manurung yang sudah sangat banyak meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
16. Raykevin B.J. Maramis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis ketika menulis skripsi ini.
17. Teman-teman Ahaye : Natalia Pepayosa, Nicky Dharmawan, Afni, Made Eti, Christy, Muhammad Dida, Karisa, Dewi terimakasih sudah selalu menghibur penulis selama penulis berkuliah di Fisip Unpar.
18. Teman-teman Today's Rachma, Sutera, Jeffry, Febe, Rizqi yang sudah banyak membantu penulis.

19. Teman-teman Galau Maniac Pranigita, Reanta, Rizki Eka Putri, Neta Arum terimakasih telah menemani penulis selama 7 tahun lamanya sebagai sahabat-sahabat yang baik.
20. Seluruh Teman-Teman Angkatan 2012,2013,2014 dan 2015.
21. Bapak Deli Lintang, Bapak Wasgi, Bapak Budi, Bapak Eman dan Mas Angga yang sudah banyak menghibur dan menemani penulis ketika sedih maupun senang selama melaksanakan perkuliahan di Fisip Unpar.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan semua pihak kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bandung, Januari 2018

Robby Abdul Malik

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
2.1. Dimensi Strategis Administrasi Publik .....	10
2.2. Akuntabilitas .....	12
2.2.1. Konsep Akuntabilitas .....	16
2.2.1.1. <i>Transparency</i> .....	16
2.2.1.2. <i>Liability</i> .....	17
2.2.1.3. <i>Controllability</i> .....	18
2.2.1.4. <i>Responsibility</i> .....	19
2.2.1.5. <i>Responsiveness</i> .....	20
2.3. Model Penelitian .....	20
BAB III METODE PENELITIAN .....	22
3.1 Tipe Penelitian .....	22
3.2. Peran Peneliti .....	24
3.3. Lokasi Penelitian .....	25
3.4. Teknik Pengumpulan Sample .....	25
3.5. Sumber Data .....	26

3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.6.1. Observasi .....	28
3.6.2. Wawancara Mendalam .....	28
3.6.3. Studi Dokumen .....	29
3.7. Analisis Data .....	29
3.8. Kualitas Data .....	30
3.9. Operasioalisasi Variabel.....	32
<b>BAB IV PROFIL PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
4.1. Visi, Misi dan Moto Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Bandung .....	36
4.2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bandung.....	37
4.3. Tugas Pokok dan Fungsi PPIDUtama Kota Bandung.....	38
4.4. Struktur Organisasi PPID Utama Kota Bandung. ....	38
4.4. Standar Operasional Prosedur PPID Kota Bandung .....	40
4.4.1. Standar Alur Kegiatan untuk Informasi Publik yang sudah tersedia di PPID Utama Kota Bandung. ....	40
4.4.2. Standar Alur Kegiatan untuk Penanganan Permohonan Informasi Publik yang belum tersedia atau dikecualikan di PPID Utama Kota Bandung .....	41
4.5. Standar Operasional Pelayanan Pemberian Informasi Publik PPID Utama Kota Bandung .....	42
<b>BAB V.....</b>	<b>62</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
5.1. <i>Transperancy</i> .....	62
5.1.1. Ketersediann Informasi Fungsi dan Kinerja PPID Kota Bandung Bagi Pemohon Informasi IMB.....	63
5.1.2. Keterbukaan Akses Mengenai Fungsi Dan Kinerja PPID Kota Bandung Bagi Pemohon Informasi IMB .....	65
5.2. <i>Liability</i> .....	69
5.2.1. Bentuk Tindakan Ilegal Yang Dilakukan Dalam Pemberian Informasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).....	71
5.2.2. Konsistensi Sanksi Yang Diberikan Ketika Melakukan Tindakan Ilegal .....	73

5.2.3. Kriteria Kinerja Yang Baik Yang Dilakukan Oleh Petugas PPID Kota Bandung Dalam Pemberian Informasi Dokumen IMB.....	76
5.2.4. Bentuk Penghargaan Yang Diberikan Oleh PPID Kota Bandung Kepada Petugas PPID Ketika Memiliki Kinerja Yang Baik Dalam Pemberian Informasi Dokumen IMB.....	79
5.3. <i>Controllability</i> .....	81
5.3.1. PPID Kota Bandung Menjalankan Tugas Utamanya. ....	81
5.3.2. PPID Kota Bandung Menjalankan Fungsi Utamanya. ....	86
5.4. <i>Responsibility</i> .....	89
5.4.1. Bertanggung Jawab Terhadap Pemohon Informasi Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung No 1352 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Dan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .....	90
5.5. <i>Responsiveness</i> .....	95
Pemohon Informasi IMB BAB VI.....	99
PENUTUP.....	99
6.1. Kesimpulan.....	99
6.2. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	105
LAMPIRAN.....	107

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel.....	32
Tabel 5.1. Ketersediaan Informasi Fungsi dan Kinerja PPID Kota Bandung .....	63
Tabel.5.2. Keterbukaan Akses Fungsi dan Kinerja PPID Kota Bandung Bagi Pemohon IMB .....	68
Tabel 5.3. Tata Cara dan Bentuk Penyampaian Informasi Fungsi dan Kinerja PPID Kota Bandung.....	73
Tabel. 5.4. Bentuk Tindakan Ilegal Yang Dilakukan Dalam Pemberian Informasi IMB .....	78
Tabel 5.5. Konsistensi Sanksi Yang Diberikan Ketika Melakukan Tindakan Ilegal .....	87
Tabel 5.6. Kriteria Kinerja Yang Baik Yang Dilakukan Oleh Petugas PPID Kota Bandung Dalam Pemberian Informasi Dokumen IMB.....	91
Tabel 5.7. Bentuk Penghargaan Yang Diberikan Oleh PPID Kota Bandung Kepada Petugas PPID Ketika Memiliki Kinerja Yang Baik Dalam Pemberian Informasi Dokumen IMB .....	95
Tabel 5.8. Pelaksanaan Tugas Utama PPID Kota Bandung.....	99
Tabel 5.9. Pelaksanaan Fungsi PPID Kota Bandung .....	114
Tabel 5.10. PPID Kota Bandung Bertanggung Jawab terhadap Peraturan Wali Kota Bandung No 1352 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.....	125
Tabel 5.11. Resonsiveness PPID Kota Bandung Dalam Memenuhi Harapan Substantive Masyarakat.....	140

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Model Penelitian.....	20
Gambar 4.1. Strukur Organisasi PPID Kota Bandung .....	39
Gambar 4.2. Standar Alur Kegiatan untuk Informasi Publik yang sudah tersedia di PPID Utama Kota Bandung.....	40
Gambar 4.3. Standar Alur Kegiatan untuk Penanganan Permohonan Informasi Publik yang belum tersedia atau dikecualikan di PPID Utama Kota Bandung.....	41
Gambar 4.4 Desk Layanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung.....	42
Gambar 4.5. Desk Layanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung.....	43
Gambar 4.6. Kegiatan Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung.....	43
Gambar 4.7. Papan Pengumuman Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung.....	44
Gambar 4.8 Layanan Via Website PPID Utama Pemerintah Kota Bandung.....	44
Gambar 4.9. Layanan Via Media Sosial Facebook PPID Utama Pemerintah Kota Bandung.....	45
Gambar 5.0. Layanan Via Media Sosial Twitter PPID Utama Pemerintah Kota Bandung.....	45
Gambar 5.1. Layanan Via Media Sosial Instagram PPID Utama Pemerintah Kota Bandung.....	46
Gambar.5.2. Layanan Via Channel Youtube PPID Utama Pemerintah Kota Bandung.....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan Ilmu Administrasi Publik. Dikatakan erat kaitannya karena akuntabilitas merupakan bentuk kapasitas organisasi publik untuk memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut.<sup>1</sup>

Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi publik tersebut<sup>2</sup>. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya badan publik harus bisa mempertanggungjawabkan segala macam aktifitas yang merupakan bagian dari tugas yang mereka miliki serta pencapaian kinerjanya kepada masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas, pemerintahan yang akuntabel dan terbuka sesuai dengan tuntutan publik pada dasarnya merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi dalam menciptakan kondisi Good Governance, hal ini berkaitan dengan prinsip akuntabilitas yang terdapat dalam konsep tersebut. Bahkan, guna menjamin pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan suatu peraturan perundang-undangan mengenai

---

<sup>1</sup> K. W. Wicaksono, 'Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik', Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik

JKAP Vol 19 No 1 - Mei 2015, hal 4.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 4.



keterbukaan informasi, yakni Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain menjamin pemerintahan yang transparan undang-undang tersebut juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>3</sup>

Untuk mengelola pelayanan informasi tersebut maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik itu di pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut. PPID sendiri melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kota Bandung telah membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui keputusan Wali Kota NOMOR : 480/Kep.179.Diskominfo/2015– 24 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Dalam keputusan walikota tersebut disebutkan bahwa salah satu tugas PPID Kota Bandung yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik. Salah satu informasi yang harus disediakan oleh PPID Kota Bandung adalah informasi mengenai dokumen Izin Mendirikan Bangunan. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai

---

<sup>3</sup> Pasal 3 Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik

dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.<sup>4</sup> Dokumen Izin Mendirikan Bangunan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat. Informasi dokumen Izin mendirikan bangunan merupakan dokumen yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pitu (DPMPTSP) Kota Bandung, namun informasi tersebut harus dimiliki oleh PPID Kota Bandung karena PPID Kota Bandung mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan informasi dari setiap SKPD dan mendokumentasikan informasi tersebut agar bisa diakses oleh masyarakat..

Namun dalam pelaksanaan tugasnya PPID Kota Bandung masih belum bisa sepenuhnya melaksanakan tugas tersebut. Ini terlihat dari masih adanya permasalahan sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi yang memohon informasi mengenai dokumen Izin Mendirikan Bangunan kepada PPID Kota Bandung. Ketika pemohon informasi meminta salinan dokumen izin IMB yang diminta, PPID tidak memberikan informasi secara lengkap mengenai dokumen tersebut dan bahkan ada pemohon informasi yang permohonan informasinya sama sekali tidak ditanggapi oleh PPID Kota Bandung.

Hal ini didukung oleh salah satu pemohon sengketa informasi yang merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan oleh PPID Kota Bandung, beliau menyatakan bahwa :

*“Saya mengajukan permohonan informasi perihal dokumen perizinan gedung Pusat Pembelajaran Art Geitze (PPAG) Universitas Katolik Parahyangan kepada PPID Utama Kota Bandung, saya meminta salinan informasi dokumen IMB pembangunan PPAG dan dokumen SLF untuk gedung PPAG, memang dokumen informasi tersebut diberikan namun tidak sesuai*

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

*harapan yang saya minta, saat pengajuan informasi jawabannya sembarangan, saya meminta dokumen Sertifikat Layak Fungsi (SLF) mereka malah menjelaskan SLF itu apa, saat meminta rekomendasi Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu(BPMPT) malah diberikan daftar perizinan yang diterbitkan BKPRD. Itu ibarat datang ke restoran sudah mesen makanan malah di kasih menu lagi dan malah menjelaskan menu lain”<sup>5</sup>.*

Selain itu terdapat pemohon informasi yang permohonan informasinya tidak ditanggapi sama sekali oleh PPID Kota Bandung. Pemohon tersebut menyatakan bahwa :

*Saya adalah penghuni apartemen gateway cicadas, saya termasuk ke dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun . Sesuai UU Nomor 20/2011 tentang Rumah Susun bahwa penghuni apartemen harus memiliki perhimpunan. Perhimpunan ini bertugas untuk mengetahui dan mengelola Bagian Bersama, Tanah Bersama dan Bangunan Bersama. Maka dari itu saya mengajukan salinan dokumen IMB dan pertelaan kepada pemerintah agar kami tau apa yang harus kami urus. **Namun permintaan tersebut tidak ditanggapi sama sekali oleh PPID Kota Bandung.** Maka dari itu kami mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Jawa Barat<sup>6</sup>*

Selain tidak ditanggapi, pemohon informasi IMB apartemen gateway tersebut justru dituntut balik oleh pemerintah Kota Bandung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk mengabulkan permohonan sengketa informasi penghuni untuk mengetahui salinan IMB<sup>7</sup>. Padahal Dokumen IMB tersebut seharusnya menjadi dokumen yang dapat diakses oleh Publik.

Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan apa yang sebaiknya dilakukan oleh badan-badan publik dalam menjalankan kewajiban mereka dalam

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan pemohon sengketa informasi Vincen mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan pada tanggal 30 juni 2017 Pukul 09.00 WIB

<sup>6</sup> Wawancara dengan pemohon sengketa informasi Bapak John pada Kamis 20 Juli 2017 Pukul 19.30 WIB

<sup>7</sup> Diakses dari <https://news.detik.com/jawabarat/3594025/digugat-pengembang-rp-12-m-eksepsi-penghuni-apartemen-gateway-ditolak> Pada Hari Selasa 19 september 2017 Pukul 08.58 WIB

mengimplementasikan praktik keterbukaan informasi publik khususnya mengenai informasi dokumen Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap penilaian masyarakat terhadap pemerintah Kota Bandung itu sendiri, karena masyarakat cenderung akan menilai bahwa Pemerintah Kota Bandung belum dapat mempertanggung jawabkan atas apa yang telah dilaksanakan, dimana masih ditemukannya kasus sengketa informasi terhadap keterbukaan informasi public . Terlebih tujuan dibentuknya Undang Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selain untuk menciptakan pemerintahan yang transparan atau terbuka adalah untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel.

Hal inilah yang dijadikan dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian akuntabilitas PPID Kota Bandung terhadap pencapaian yang dimiliki dalam mengimplementasikan Undang Undang No 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Pubik khususnya dalam keterbukaan informasi mengenai Izin Mendirikan Bangunan. Koppell menjelaskan bahwa dalam mengukur akuntabilitas sebuah Badan Publik, terdapat lima dimensi utama yaitu<sup>8</sup> ; *transparency, liability, controllability, responsibility, and responsiveness* Kelima dimensi tersebut menurut Koppell merupakan *framework* yang seimbang untuk pemahaman dan penilaian akuntabilitas organisasi di sektor

---

<sup>8</sup> Koppell dalam Aini Aman dkk, 2013, "Enhancing public organizations accountability through EGovernment systems", *International Journal of Conceptions on Management and Siocial Sciensces*, Vol. 1, hal. 17-18

publik. Kopell juga menyatakan bahwa sinergi dari lima komponen tersebut bisa memperbaiki kebingungan yang hadir dengan konsep akuntabilitas.<sup>9</sup>

Merujuk pada pemaparan diatas, peneliti kemudian hendak menggali bagaimana akuntabilitas yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung dalam pemberian informasi dokumen Izin Mendirikan Bangunan. Oleh karena itu, topik penelitian yang peneliti teliti adalah:

**“Akuntabilitas PPID Kota Bandung dalam Pemberian Informasi Publik (Studi Kasus Pada Permasalahan Sengketa Informasi mengenai Pemberian Informasi Dokumen Izin Mendirikan Bangunan)”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang peneliti gunakan adalah Bagaimana akuntabilitas PPID Kota Bandung dalam pemberian informasi publik terkait sengketa informasi dalam pemberian informasi dokumen Izin Mendirikan Bangunan dilihat dari aspek 1) *Transperancy* 2) *Liability* 3) *Controlability* 4) *Responsibility* 5) *Responsiveness*

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan Akuntabilitas PPID Kota Bandung Dalam Pemberian Informasi mengenai dokumen Izin Mendirikan Bangunan.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 16

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Atasan PPID Kota Bandung agar lebih mengetahui tentang akuntabilitas publik yang dilakukan oleh PPID Kota Bandung dalam memberikan informasi mengenai Dokumen Izin Mendirikan Bangunan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana Akuntabilitas PPID Kota Bandung dalam pemberian informasi mengenai dokumen Izin Mendirikan Bangunan. Untuk itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas enam bab, yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang,
- 1.2. Rumusan Masalah,
- 1.3. Tujuan Penelitian,
- 1.4. Manfaat Penelitian, dan
- 1.5. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

- 2.1. Dimensi Strateis Administrasi Publik,
- 2.2. Akuntabilitas,

2.3. Konsep Akuntabilitas,

2.4. Model Penelitian

### BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian,

3.2. Peran Peneliti,

3.3. Lokasi Penelitian,

3.4. Teknik Pengumpulan Sample,

3.5. Sumber Data,

3.6. Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data.

### BAB IV : PROFIL PENELITIAN

4.1. Visi, Misi, Moto PPID Kota Bandung,

4.2. Tugas Pokok dan Fungsi PPID Kota Bandung,

4.3. SOP PPID Kota Bandung,

4.4. Kedudukan PPID Kota Bandung,

4.5. Mekanisme Pengumpulan, Pendokumentasian, Pengklasifian, dan  
Pelayanan Informasi.

### BAB V : ANALISI DATA

5.1. *Transperancy*

5.2. *Liability*

5.3. *Controlability*

5.4. *Responsibility*

5.5. *Responsiveness*

## BAB VI : PENUTUP

6.1. Kesimpulan

6.2. Saran